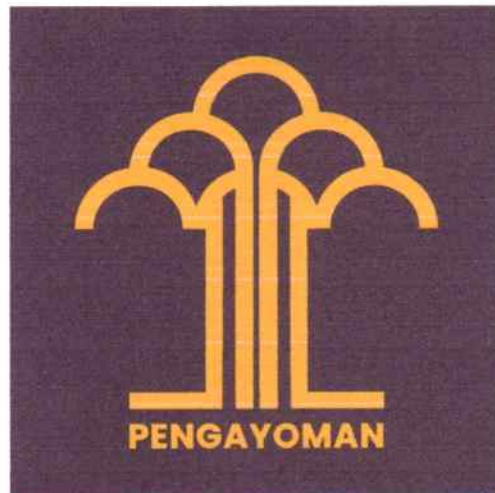


**LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN  
SOSIALISASI PENERAPAN SPIP TERINTEGRASI  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT**



**NAMA : ABI HARUN ARROISI**  
**NIP 198512272009121007**  
**SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**NUSA TENGGAR BARAT**

**PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah, guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas serta mencegah terjadinya penyimpangan. SPIP Terintegrasi hadir sebagai penyempurnaan dengan pendekatan kolaboratif, sistematis, dan terukur untuk memperkuat pengendalian intern secara menyeluruh di seluruh aspek organisasi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk melaksanakan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis pegawai dalam penerapannya, telah dilaksanakan pelatihan sosialisasi SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari laporan ini adalah untuk mendeskripsikan tindak lanjut dan implementasi dari hasil pelatihan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Tujuan laporan ini antara lain:

1. Menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasca pelatihan.
2. Menjelaskan hasil nyata implementasi SPIP Terintegrasi di unit kerja.
3. Menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas penerapan pengendalian intern.

### **C. Ruang Lingkup**

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi internal, pembentukan tim pelaksana SPIP Terintegrasi, identifikasi risiko di unit kerja, penyusunan dokumen pendukung pengendalian intern, serta analisis terhadap hasil dan kendala yang dihadapi selama implementasi.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Setelah mengikuti pelatihan sosialisasi SPIP Terintegrasi, Kantor Wilayah Kemenkum NTB melaksanakan beberapa kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Diseminasi Hasil Pelatihan
  - Menyampaikan materi pelatihan kepada pejabat struktural dan seluruh pegawai melalui forum koordinasi dan rapat staf.
  - Penyusunan bahan presentasi dan ringkasan materi SPIP Terintegrasi sebagai media sosialisasi.

2. Pembentukan Tim Implementasi SPIP
  - Dibentuk Tim Penguatan Pengendalian Intern yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan SPIP Terintegrasi di lingkungan kantor wilayah.
3. Pemetaan Risiko dan Pengendalian
  - Melakukan identifikasi proses bisnis utama di tiap divisi.
  - Menyusun peta risiko dan rencana tindak mitigasi risiko berdasarkan hasil pemetaan.
4. Penguatan Dokumen dan Evaluasi SPIP
  - Menyesuaikan SOP dan dokumen administratif lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.
  - Mengintegrasikan laporan pengendalian intern ke dalam agenda monitoring dan evaluasi rutin.

### **III. HASIL YANG DICAPAI**

Implementasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB telah menunjukkan capaian-capaian berikut:

1. Meningkatnya Pemahaman Pegawai  
Pemahaman pegawai terhadap pengertian, komponen, serta tujuan SPIP meningkat secara signifikan melalui kegiatan sosialisasi internal.
2. Dokumen Risiko dan Kontrol Tersusun  
Telah tersusun dokumen seperti peta risiko, daftar kontrol, serta formulir evaluasi risiko yang dapat digunakan dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan.
3. Integrasi SPIP dalam Proses Layanan  
Beberapa proses kerja di bidang pelayanan publik seperti Keimigrasian dan Pemasarakatan mulai mengadopsi prinsip pengendalian intern sebagai bagian dari SOP.
4. Peningkatan Komitmen Pimpinan dan Unit Kerja  
Pimpinan menunjukkan dukungan aktif dalam penguatan SPIP, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan mengalokasikan sumber daya untuk implementasi.

### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Implementasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum NTB telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan peningkatan pemahaman pegawai, pembentukan dokumen pendukung, dan integrasi pengendalian intern ke dalam proses kerja.

#### **Saran**

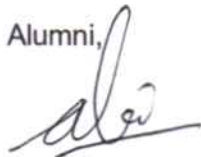
1. Peningkatan Kapasitas Lanjutan  
Diperlukan pelatihan teknis lanjutan agar pegawai mampu menyusun dan menerapkan pengendalian yang lebih efektif.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala  
Perlu dibentuk sistem monitoring rutin untuk memastikan pelaksanaan SPIP berjalan sesuai rencana.
3. Dukungan dan Sinergi Antar Divisi  
Implementasi SPIP akan berjalan lebih optimal apabila seluruh divisi/unit kerja secara aktif berkolaborasi dan bersinergi.

## V. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap implementasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi yang telah diikuti oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Diharapkan implementasi ini dapat menjadi landasan penting bagi penguatan sistem pengendalian intern serta peningkatan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Alumni,



Abi Harun Arroisi

Dikeluarkan di Mataram

Pada tanggal 21 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Muhammad Amin Imran

**DOKUMENTASI IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN  
SOSIALISASI PENERAPAN SPIP TERINTEGRASI  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT**

